

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Fenomena *Arab Spring* yang terjadi pada tahun 2011 lalu telah memberikan inspirasi kepada penulis untuk lebih mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Negara-negara Islam di Timur Tengah khususnya revolusi yang terjadi di Negara Mesir. Dalam tulisan ini, Penulis memilih Negara Mesir karena Mesir merupakan basis berdirinya suatu kelompok atau gerakan Islam yang cukup berpengaruh di abad 20-an, yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin. Meskipun selalu berada di bawah tekanan rezim yang otoriter, kelompok ini dapat mempertahankan eksistensinya, bahkan mereka terus berkembang sampai ke luar Mesir termasuk ke Asia dan Eropa. Dan puncaknya pada bulan Juni 2012 lalu, salah satu calon mereka berhasil merebut kursi kepresidenan di Negara tersebut.

Selain itu penulis juga tertarik untuk mencermati beberapa fenomena yang menarik terkait dengan interaksi kelompok-kelompok Islam yang ada di Negara tersebut sebelum ataupun setelah Revolusi, khususnya pada kelompok Ikhwanul Muslimin itu sendiri dan kelompok Salafi. Yang terakhir, penulis tertarik pada konsep Negara Islam yang berusaha dijalankan oleh kedua kelompok (Ikhwanul Muslimin Dan Salafi) di Mesir. Setelah sekian lama Mesir selalu menjadi Negara nasionalis dan sekuler di bawah kekuasaan rezim-rezim sebelumnya.

B. Latar Belakang

Ikhwanul Muslimin dan Salafi merupakan dua kekuatan Islam yang baru-baru ini muncul, terutama setelah digulingkannya Hosni Mubarak setelah demo besar-besaran di halaman Tahrir Mesir, Januari 2011 lalu. Kedua INGO berbasis Islam ini sejatinya telah menanamkan banyak pengaruh di negara tersebut, khususnya pada abad 19-an. Dan dengan lengsernya rezim Hosni Mubara kini mereka berkesempatan untuk kemudian berusaha mewujudkan cita-cita mereka mempersatukan umat Islam seluruh dunia dengan cara membentuk satu jama'ah yang mereka kenal dengan "*Jama'atul Muslimin*"¹, yang mana semuanya itu akan berawal dari pembentukan Negara Islam di Mesir.

Yusuf al Qardhawi² berpendapat bahwa Negara Islam adalah Negara yang menerapkan hukum sebagaimana yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga menjelaskan bahwa kesatuan Negara Islam tidak boleh dibatasi dengan batasan geografi.³

Sejak awal berdirinya Ikhwanul Muslimin, Hasan Al Banna sebagai Mursyid Am yang pertama telah menjelaskan dua tujuan utama dari pembentukan kelompok ini. Beliau berkata:

¹ Di dalam al mu'jam-al wasith, jama'ah Islamiyah diartikan dengan "sejumlah besar manusia", atau "sekelompok manusia yang berhimpun untuk mencapai tujuan yang sama". Lihat Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, M. A. *Menuju Jama'atul Muslimin*, Telaah Sistem Jamaah Dalam Gerakan Islam, rabbani press, Jakarta. 2011.

² Adalah salah satu pejuang Ikhwanul Muslimin pada masa Hadan Al Banna yaitu mursyid Am yang pertama dan saat proses penulisan skripsi ini sedang menjabat sebagai Ketua Persatuan Ulama Umat Islam Dunia. Lihat Abu Ghazzah, *Musim Semi Revolusi Dunia Arab*, Maktaba Gaza, Jakarta. 2012

³ <http://caktips.wordpress.com/2012/03/15/konsep-negara-islam-menurut-dr-yusuf-al-qardhawi-studi-analisa/>

"Camkan selalu, bahwa kalian memiliki dua sasaran utama:
Membebaskan Negeri-Negeri Islam dari seluruh cengkraman pihak agresor asing, sebab kemerdekaan merupakan hak setiap manusia yang tidak ada yang memungkirinya kecuali orang zalim dan durjana.

Hendaknya pada Negeri Islam yang bebas itu berdiri kedaulatan Islam yang merdeka memberlakukan hukum Islam, menerapkan sisten masyarakat Islam, memproklamirkan prinsip-prinsipnya yang lurus dan menyampaikan dakwahnya ke seluruh manusia. selama kondisi seperti ini belum terrealisir, maka kaum Muslimin seluruhnya menanggung dosa dan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT, disebabkan kelalaián mereka dan sikap diam mereka dari mewujudkannya.⁴

Selama ini terdapat beberapa INGO berbasis Islam yang mengklaim kelompok mereka sebagai representasi untuk mewujudkan Jama'atul Muslimin tersebut seperti *Hizbut Tahrir, Jama'ah Tabligh, Jama'ah Anshar As-Sunnah Al Muhammadiyah* termasuk juga *Ikhwanul Muslimin dan Salafi*. Namun ajaran dan orientasi yang berbeda menyebabkan beberapa kelompok tersebut saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya meskipun mereka sama-sama gerakan Islam.

Ikhwanul Muslimin dan Salafi di Mesir menjadi contoh dari gerakan Islam yang saling bertentangan. Walaupun pada dasarnya mereka sama-sama membawa panji Islam, namun beberapa perbedaan telah menyebabkan mereka saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang pertama adalah bentuk interaksi kedua kelompok tersebut terhadap pemerintahan Mesir sebelum revolusi, dimana Ikhwanul Muslimin sangat keras menentang pemerintah sedangkan Salafi

⁴Syaikh Jasim Muhalhil. *Ikhwanul Muslimin: Deskripsi, Jawaban Tuduhan Dan Harapan* diunduh dari http://www.oocities.org/gigih67/document/Ikhwanul_Muslimin.pdf 09/29/2012

memilih untuk bersikap lebih permisif dengan pemerintah bahkan mereka tidak terlibat dalam revolusi yang menjatuhkan rezim otoriter Hosni Mubarak.

Perbedaan kedua yaitu pada proses perjuangan kedua kelompok tersebut dalam pembentukan Negara Islam, khususnya pada bidang politik. Perjuangan Ikhwanul Muslimin dalam bidang politik sebelum revolusi sangat bertentangan dengan pendapat Salafi pada masa itu. Selama itu, tidak pernah ada wacana, bahwa Salafi akan mendirikan partai politik, karena mereka menganggap partai politik sebagai sebuah “bid’ah”. Mereka hanya terfokus pada kegiatan dakwah, dan mendidik umat mengenal Islam dan mendalaminya, terutama mendidik generasi muda Muslim, agar mereka mengikuti jejak para generasi pertama Salaf, yang benar-benar hanya mengutamakan al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad shallahu alaihi wassalam.⁵

Salafi adalah sebuah kelompok yang bisa juga dibilang sangat anti dengan organisasi. Sebagai contoh di LIPIA Jakarta yang merupakan pusat studi Islam yang dimotori langsung dari Arab Saudi dan telah banyak mengadopsi ajaran-ajaran Salaf. Sebagaimana ciri umum Salafi generasi 1980-an di LIPIA tersebut sangat anti terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh dan Darul

⁵<http://www.globalMuslim.web.id/2012/04/alafi-kami-menolak-negara-agama.html>

Islam. Jangankan untuk bergaul dengan mereka yang berorganisasi, dengan sesama Salafi yang berorganisasipun mereka menolak untuk dibantu secara keuangan.⁶

Perbedaan selanjutnya terlihat pada bagaimana pandangan kedua kelompok tersebut terhadap kelompok Islam lainnya. Berinteraksi dengan kelompok Islam lain yang kurang disukai oleh kelompok Salafi, mendorong kelompok Salafi untuk melontarkan beberapa pernyataan yang kurang bersahabat, bahkan sampai pada titik membid'ahkan. Pernyataan ini muncul dalam tulisan Al-Ustadz Qomar ZA, Lc dalam tulisannya yang berjudul "*Sejarah Suram Ikhwanul Muslimin*", beliau menjelaskan Lima point pokok yang membuktikan bahwa Ikhwanul Muslimin sangat dekat dengan bid'ah. *Pertama*, Menggabung Kelompok-kelompok Bid'ah. *Kedua*, Lemahnya Al-Wala' dan Al-Bara'. *Ketiga*, Tidak Perhatian terhadap Aqidah. *Keempat*, Menganggap Sepele Bid'ah dalam Agama. *Kelima*, Bai'at Bid'ah.⁷

Mesir sendiri pada abad 15 masih berada di bawah kekuasaan kaum Mamluk. Sejak ditaklukkan oleh Sultan Salim tahun 1517, daerah ini pada hakekatnya merupakan bagian dari kerajaan Utsmani. Tetapi setelah bertambah lemahnya kekuasaan Sultan-Sultan di abad ke tujuh belas, Mesir mulai melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul dan akhirnya menjadi daerah otonom.⁸

⁶<http://Wahabinews.wordpress.com/2012/02/29/Salafi-melawan-Salafi-perkembangan-Salafi-di-indonesia-dan-perpecahannya-diantara-mereka/>

⁷<http://www.Salaf.web.id/1043/sejarah-suram-ikhwanul-muslimin-al-ustadz-qomar-za-lc.htm>

⁸Harun nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, bulan bintang, Jakarta 1975. Hal 28.

Mesirpun terus mengalami pergantian penguasa hingga pada awal abad ke 18 Mesir berhasil dikuasai oleh seorang Napoleon Bonaparte dari Perancis dan berhasil menanamkan ide-ide baru sebagai produk dari revolusi Perancis pada abad ke 16. Ide-ide tersebut antara lain, Pertama adalah sistem pemerintahan Republik yang di dalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu, tunduk pada Undang-Undang Dasar dan bisa dijatuhkan oleh parlemen. Kedua adalah ide persamaan (egalite) dalam arti sama kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam soal pemerintahan. Yang ketiga adalah ide kebangsaan.⁹ Maka sejak saat itulah Mesir selalu menggunakan sistem pemerintahan Barat dan mulai menjauh dari Islam.

Meskipun kita ketahui bahwa Islam berkembang pesat di Mesir, namun rezim-rezim yang berkuasa setelahnya secara eksplisit konstitusi Mesir, menegaskan bahwa Islam sebagai agama negara, tetapi tidak secara tegas menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum tertinggi dalam Undang-Undang di Mesir. Oleh karena itu, rezim-rezim yang berkuasa pada abad ke 19 selalu mengebiri penegakkan Syariah Islam di negeri Spinx tersebut.¹⁰

Pada tanggal 23 juli 1952 Gamal Abdul Nasser melakukan kudeta terhadap Raja Farouq dan berhasil menumbangkannya. Selanjutnya mengangkat Muhammad Najib sebagai Presiden pertama Mesir pada tahun 1953, tetapi kendali pemerintahan tetap berada di tangannya. Pada tahun 1954 Muhammad Najib dipecat karena

⁹Ibid hal. 31

¹⁰<http://m.voa-islam.com/news/opini/2012/09/02/20434/Mesir-Salafi-dan-lkhwan-bersatu-menegakkan-syariah-Islam/>

tuduhan mengadakan persekongkolan dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Setelah itu Nasser mengangkat dirinya sendiri sebagai perdana menteri kemudian menjadi Presiden pada tahun 1956, dari situlah Nasser mulai menghancurkan Ikhwanul Muslimin. Kantor-kantor organisasinya ditutup, ribuan anggotanya ditangkap dan sejumlah pemimpinnya dihukum mati.

Gamal Abdul Nasser membawa Ideologi Pan Arabnya ke Dunia Islam. Beliau tidak anti Islam, hanya saja perhatiannya terhadap Islam menduduki tempat kedua. Selanjutnya tidak memberikan kesempatan kepada kelompok Islam untuk ikut serta dalam kekuasaan. Dengan demikian dukungan Ikhwanul Muslimin kepada Nasser ditarik kembali karena Nasser tidak bersedia memenuhi aspirasi pembentukan Negara Islam Mesir.¹¹

Presiden Gamal Abdul Nasser meninggal dunia pada tahun 1970, dan wakilnya, Anwar Sadat, dilantik menggantikannya. Saat itulah dimulai sebuah era baru yang sering disebut sebagai era “*Al-Infatih*” (keterbukaan). Mesir memberikan ruang bernapas yang lebih lega kepada kelompok-kelompok Islam. Presiden Anwar Sadat berusaha membangun basis dukungan di kalangan rakyat untuk menghadapi musuh-musuh politiknya. Salah satunya dengan membebaskan beberapa tahanan Ikhwanul Muslimin yang ditahan pada masa Gamal Abdul Nasser. Sikap Ikhwanul Muslimin yang kritis terhadap pemerintah membuat Anwar Sadat tidak suka sehingga

¹¹[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031MAKHMUD SYAFE'I/JAMAL_ABDUL_NASSER_\(NASIONALISME_ARAB\).pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031MAKHMUD_SYAFE'I/JAMAL_ABDUL_NASSER_(NASIONALISME_ARAB).pdf)

atmosfer politik Mesirpun berubah. Hingga puncaknya di era 1960-an, umat Islam mengalami kemunduran yang parah. Syariat Islam ditinggalkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam buku *Fi Zhilali Suratit Taubah*, Dr. Abdullah Azzam menggambarkan bahwa pada masa itu di Universitas Al-Azhar hampir tidak ada mahasiswi yang mengenakan jilbab. Hanya saudara perempuan Sayyid Quthub yang mengenakan busana syar'i.¹²

Sejak Mesir dikalahkan secara telak oleh Israel pada Perang 5 Juni 1967 pelaksanaan Syariat Islam semakin sulit untuk diwujudkan. Beberapa kelompok seperti *Jamaah Jihad*¹³ yang ingin ikut menegakkan Syariat Islam harus menghadapi tantangan besar karena negara mereka justru berasaskan sekularisme. Ideologi sekuler ini dikawal langsung oleh kekuasaan, militer dan sistem yang established (mapan).¹⁴ Hal tersebut mempertegas kepada pembaca bahwa sebelum revolusi terjadi, Negara Mesir meskipun dihuni oleh mayoritas umat Islam, namun sistem Negeranya sendiri adalah sekuler dan bukan Syariat Islam. Sehingga Undang-Undang yang digunakan tidak berlandaskan pada Syariat Islam.

Hingga pada masa rezim Hosni Mubarak, penindasan terhadap umat Islam masih terus terjadi. Bahkan Mesir dibawah pimpinannya mau bekerjasama dengan Israel untuk ikut menindas Palestina melalui perjanjian-perjanjian, sehingga pada

¹²Hani As-Siba'i, *Qishatu Jama'atil Jihad*, Al-Maqrezy Centre for Historical Studies, London
terjemahan Balada *Jamaah Jihad Melacak Kiprah Aiman Azh-Zhawahiri [Orang ke-2 Al-Qa'idah]*,
Jazera, Solo 2005. Hal 13

¹³ Suatu jema'ah Islam yang dipimpin oleh Aiman Azh-Zhawahiri yang berdiri tahun 1960-an

¹⁴ Op cit. , hal 18

masa itu Mesir merupakan sekutu setia Israel. Pemerintah Mubarak menjamin pasokan gas dari Mesir ke Israel. Rezim Mubarak pula yang selama ini membentengi Israel dan Amerika Serikat dari kelompok radikal yang didukung Iran di Timur Tengah. Mubarak juga gigih dan aktif menentang Hisbullah di Libanon dan Hamas di Jalur Gaza.¹⁵

Bulan juni 2012 lalu adalah bukti dimana kekuatan Islam mulai bangkit lagi di Mesir setelah beberapa dekade selalu berada di bawah tekanan rezim yang otoriter. Tepatnya pada tanggal 25 juni 2012 Komisi Pemilihan Umum yang diketuai oleh Farouk Sultan, mengumumkan hasil pemilu siang itu. Hasilnya adalah **Mohammad Mursi**, calon dari Ikhwanul Muslimin akhirnya resmi menjadi presiden Mesir dengan memenangkan 51,8 %, yaitu 13,2 juta suara sedangkan Ahmed Safiq memperoleh 12,3 juta suara dari 26 juta pemilih. Lebih dari 800.000 surat suara dinyatakan tidak sah.¹⁶

Kemenangan itu telah memberi perubahan di negeri piramid tersebut. Perubahan di Mesir yang sangat dramatis menampilkan gabungan kekuatan Islam, yaitu Salafi dan Ikhwanul Muslimin yang menjelma menjadi kekuatan politik utama, karena sekarang telah bersatu dalam satu kapal. Salafi dan Ikhwan saling bahu-membahu, mencari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan paska revolusi.¹⁷

¹⁵<http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/husni.mubarak/page04.php>

¹⁶<http://luar-negeri.kompasiana.com/2012/06/24/mohammed-morsy-presiden-Mesir-terpilih/>

¹⁷<http://m.voa-islam.com/news/opini/2012/09/02/20434/Mesir-Salafi-dan-Ikhwan-bersatu-menegakkan-syariah-Islam/>

Salah satu bentuk kerjasamanya adalah Salafi dan Ikhwan memiliki kesepakatan yang sama, bahwa syariah Islam (al-Qur'an dan Sunnah), menjadi sumber hukum tertinggi dalam perundang-perundangan di negara Mesir. Seperti yang tertera dalam Konstitusi ayat II, tahun 1971, yang akan diamandemen menjadi: *Islam sebagai agama negara, bahasa Arab menjadi bahasa nasional, dan kemudian Syariah Islam menjadi sumber hukum tertinggi perUndang-Undangan.*¹⁸ Inilah sebuah hasil yang paling pokok (asas) dari kerjasama antara Salafi dan Ikhwan di Mesir, yang berhasil menguasai parlemen di negeri piramid itu.

Bergabungnya dua organisasi Islam yang cukup besar ini memungkinkan munculnya kekuatan Islam baru di Timur Tengah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Kelompok Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan Organisasi Internasional yang sudah memberikan banyak pengaruh di berbagai Negara termasuk di Indonesia sendiri. Apalagi kita mengenal Salafi yang notabeneanya lebih senior dari Ikhwanul Muslimin sudah jelas memberikan banyak pengaruh di seluruh dunia terutama dunia Islam. Sehingga Mesir yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin ini dapat diprediksi bahwa kedepannya bisa menjadi salah satu kiblat Negara Islam di Timur Tengah selain Arab Saudi dengan Wahabinya dan Iran dengan Syi'ahnya. Namun ketika kita kembali pada beberapa cerita di atas sebenarnya terdapat sebuah fenomena yang menarik yakni paska revolusi ini dimana Ikhwanul Muslimin bersedia untuk bekerjasama dengan Salafi untuk sama-sama membentuk Negara Islam di Mesir.

¹⁸ *Ibid.*,

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari beberapa penjelasan komparatif di atas, penulis tertarik untuk menjawab sebuah pertanyaan mendasar dari kasus tersebut untuk dijelaskan lebih mendalam dalam pembahasan. Pertanyaan tersebut adalah:

Mengapa kelompok Ikhwanul Muslimin yang selama ini cenderung bertentangan dengan kelompok Salafi dan sulit bekerjasama, setelah terjadinya revolusi di Mesir tahun 2011 dapat menjalin kerjasama dengan kelompok tersebut dalam pembentukan Negara Islam?

D. Landasan Teoritik

Untuk sampai kepada pembahasan, diperlukan jembatan pemikiran agar dapat memudahkan penulis dalam menjawab beberapa pertanyaan di atas serta memudahkan pembaca dalam memahami pokok pembahasan. Maka dari itu, penulis menggunakan jembatan pemikiran berupa konsep maupun teori yang mendasar yang berhubungan dengan teori kerjasama dan negara Islam seperti yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Teori Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur *dua pihak atau lebih*, *unsur interaksi*, dan *unsur tujuan bersama*. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek

yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada *posisi yang seimbang, serasi dan selaras*.¹⁹

Soerjono Soekanto²⁰ dalam bukunya "*Sosiologi Suatu Pengantar*" mengatakan kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang sama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerjasama.²¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *kerjasama terjadi jika suatu pihak ataupun*

¹⁹S. Pamudji, *Kerjasama antar daerah dalam rangka pembinaan wilayah : suatu tinjauan dari segi administrasi Negara*, Bina Aksara Jakarta : 1985 yang di post di <http://vektorsmg.wordpress.com/2011/12/18/kumpulan-teori-kerjasama/>

²⁰Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

²¹Soerjono Soekanto. *Sosiologi suatu pengantar*. Edisi 4. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Dari <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:vGfVcXIQIUJ:elib.unikom.ac.id/download.php%3Fid%3D27443+konsep+orientasi+hubungan+internasional&hl>

kelompok saling berinteraksi untuk sama-sama memenuhi kepentingan sebagai tujuan bersama.

Dalam kasus ini Ikhwanul Muslimin dan Salafi pada awalnya memang memiliki beberapa perbedaan, namun pada dasarnya mereka memiliki persamaan mengenai tujuan dan konsep Negara Islam. Dan jika ditelaah dengan teori kerjasama di atas, penulis mencoba menegaskan bahwa Ikhwanul Muslimin sejak berdirinya telah memiliki tujuan untuk membangun Negara Islam.

2. Konsep Negara Islam

Yusuf al Qardhawi berpendapat bahwa Negara Islam adalah Negara yang menerapkan hukum sebagaimana yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun juga bukan Negara agama sebagaimana yang sering didefinisikan oleh kaum orientalis Barat, dan semua komunitas yang ada di dalamnya yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama hidup di dalamnya dengan menggunakan aturan Syariat Islam, sebagaimana yang pernah ada pada jaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW di *al-Madinah al-Munawwarah*, yang pemimpin Negara Islam bukanlah orang yang ma'shum dan pejabat Negara yang menopang pemerintahannya tidak pula ma'shum, namun mereka adalah manusia biasa yang berperilaku benar dan bisa melakukan kesalahan.

Negara Islam menurut al Qardhawi harus berasaskan Islam yang dikondisikan memiliki lingkungan dan nuansa kehidupan yang Islami dan menyelesaikan urusan politik kenegaraan dengan jalan musyawarah-mufakat. Secara kekuasaan, Yusuf al Qardhawi melihat bahwa Negara Islam sebenarnya adalah Negara yang berbasis kepada kepercayaan publik, namun ia sangat keras menolak model Negara rakyat seperti yang dimaksud demokrasi, ia menyatakan bahwa *Negara Islam adalah Negara rakyat yang berbasis kepada wahyu Allah, bila terjadi benturan antara wahyu Allah dan kepentingan publik yang jelas melanggar wahyu Allah, maka wahyu Allah harus dijadikan rujukan utama dalam mengambil kebijakan.* Maka tidak mengherankan bila kemudian ia menyatakan bahwa tujuan pendirian Negara ini haruslah **Al Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyu 'Anil Munkar** (penegakkan yang ma'ruf dan pencegahan yang mungkar). Hingga diharapkan Negara Islam bisa mendapatkan kekuatan dan pertolongan Allah SWT.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa kesatuan Negara Islam tidak boleh dibatasi dengan batasan geografi. Negara Islam adalah cakupan luas bangsa sedunia yang di dalamnya terdapat Muslim, ia menerangkan bahwa dimanapun terdapat orang yang beriman, maka Negara itu juga dinyatakan sebagai Negara Islam yang harus dibela dan dibantu penduduknya bila terdzalimi. Peniadaan batasan Negara yang digagas Yusuf al-Qardhawi seolah bertentangan dengan devinisi "*nation state*" yang dikenal secara umum, yang dinyatakan sebagai: "*A state that the self-identities as deriving its political*

legitimacy from serving as sovereign entity for a nation as sovereign territorial unit. Yang berarti: Negara yang mengidentifikasikan diri sebagai Negara yang bermuara dari legitimasi politik yang bertujuan untuk melayani sebuah bangsa yang berdaulat yang memiliki unit territorial atau batasan wilayah yang jelas.

Yusuf al Qardhawi tidak mengingkari adanya berbagai bentuk Negara, termasuk "*nation state*", hal ini bisa dibuktikan dari pendapatnya yang mendorong umat Islam untuk mengikuti proses politik yang berjalan di Negara masing-masing termasuk pemilu dalam menentukan pimpinan Negara dan lain sebagainya. Maka gagasan Negara Islam sebagai Negara yang tidak mengenal batasan geografi adalah sebagai bentuk perwujudan sikap persaudaraan Muslim yang harus dimiliki, dengan artian siapapun Muslim yang teraniaya di Negara manapun harus dibela jiwa dan raga, sebab ia memandang ia saudara seiman, bukan sebagai orang asing yang dibatasi wilayah geografi negara. Sikap konsisten membantu kesulitan umat Islam di Negara lain ini ditunjukkan al Qardhawi saat ia diutus membela penduduk Palestina yang dijajah Israel dan berangkat berjuang ke sana pada tahun 1948 yang akhirnya membawanya masuk penjara Mesir. Langkah memperjuangkan umat Islam ia lakukan di segala sisi dari dakwah, ekonomi, pendidikan hingga urusan sosial. Hal ini tercermin dari berbagai jabatan yang ia sandang.

Dia tidak memiliki maksud bahwa Negara Islam adalah Negara yang berbasis Khilafah Islamiyah. Ia menyebutkan syarat disebut sebagai Negara Islam adalah: (1) Bersumber ushul agama Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadits. (2) Memiliki pemimpin yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan, sebagai pemimpin yang Islami.²²

Sedangkan Pengertian NEGARA ISLAM menurut Ulama' Lajnah Daimah Saudi Arabia dan Ulama Salafi adalah:

“Bila suatu negara menegakkan hukum Islam secara keseluruhan tanpa kecuali dan diperintah oleh orang-orang Muslim serta kebijakan ada di tangan mereka, maka negara tersebut adalah Negara Islam, meskipun mayoritas penduduknya kafir.”²³

Dengan demikian, dari dua konsep yang mirip tersebut penulis menyimpulkan bahwa kelompok Ikhwanul Muslimin akan beresedia untuk bekerjasama dengan Salafi dalam pembentukan Negara Islam di Mesir.

E. Hipotesa

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, penulis ingin menyimpulkan dengan jawaban sementara, yaitu *kelompok Ikhwanul Muslimin yang selama ini cenderung bertentangan dengan kelompok Salafi dan sulit bekerjasama, setelah terjadi revolusi Mesir tahun 2011 dapat menjalin kerjasama dengan kelompok tersebut dalam pembentukan Negara Islam. Karena Pertama, kelompok Salafi mengubah*

²²<http://caktips.wordpress.com/2012/03/15/konsep-negara-islam-menurut-dr-yusuf-al-qardhawi-studi-analisa/>

²³Lihat Al Fatawa As Sa'diyyah karya Syaikh Abdurrahman Nashir A Sa'diy 1/92, cetakan II tahun 1402, Maktabul Ma'arif Riyadl.

orientasinya tentang politik yang dahulunya bersebrangan kini menjadi sejalan dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. *Kedua*, perubahan orientasi yang sudah sejalan memunculkan beberapa kesamaan antara keduanya sehingga mendorong mereka untuk menjalin kerjasama dalam pembentukan Negara Islam.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi pustaka. Sehingga untuk pengumpulan data pada penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan data-data primer ataupun sekunder seperti buku, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, surat kabar, data internet dan literatur lain yang relevan dengan keperluan penelitian penulis.

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis ingin memahami interaksi antara beberapa kelompok ataupun gerakan Islam yang berada di Mesir terutama Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Kemudian bagaimana hubungan kerjasama mereka bisa membawa Mesir menjadi sebuah Negara yang berlandaskan Syariat Islam.
2. Penulis dapat mengembangkan teori-teori yang sudah didapatkan pada masa kuliah melalui penelitian ini.
3. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menempuh jenjang S1 pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Hubungan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih fokus pada pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis sengaja memberikan batasan tertentu pada waktu dan aktornya. Pertama, penelitian ini dilakukan sejak sebelum revolusi dimana artikulasi kekuatan massa mulai berkumpul dan mengadakan demonstrasi dimana-mana, sampai terjadinya revolusi di Mesir pada Januari 2011 yang ditandai dengan lengsernya Hosni Mubarak.

Kedua, Penelitian ini bercerita seputar kelompok atau gerakan Islam Ikhwanul Muslimin dan juga Salafi yang sudah memiliki pengaruh yang besar di seluruh dunia terutama di Timur Tengah sendiri. Yaitu bagaimana interaksi antara kedua kelompok tersebut sebelum dan sesudah terjadinya revolusi sampai selesainya pemilu di Mesir yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Ikhwanul Muslimin pada bulan Juni 2012.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan tentang alasan penulis memilih judul ini, latar belakang, rumusan masalah, hipotesa, metode pengumpulan data, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua skripsi ini memberikan gambaran umum tentang kelompok Ikhwanul Muslimin dan Salafi, beberapa perbedaan gerakan dakwah serta tujuan-tujuan mereka. Selain itu bab ini juga memberikan gambaran tentang Negara Islam di Mesir yang ingin dibentuk paska revolusi.

Bab ketiga skripsi ini membahas tentang pentingnya posisi pemilu bagi kelompok Ikhwanul Muslimin. Selain itu, bab ini juga akan menggambarkan bentuk kerjasama Ikhwanul Muslimin dengan Salafi paska revolusi hingga terpilihnya Mohammad Mursi sebagai presiden Mesir melalui pemilu pada bulan juni 2011 lalu.

Bab keempat skripsi ini memberikan analisa tentang alasan-alasan mengapa kelompok Ikhwanul Muslimin bersedia untuk menjalin kerjasama dengan kelompok Salafi yang memiliki banyak perbedaan.

Bab kelima skripsi ini adalah penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.